

## Demokrasi Terkonsolidasi, Rakyat Makmur!

### ANALISIS

Oleh Teguh Yuwono



**PILKADA** serentak 2017 merupakan pengalaman demokrasi yang sudah lama dipraktikkan dalam sistem politik Indonesia, sejak pemilu pertama tahun 1955. Artinya, rakyat sesungguhnya telah berpengalaman menentukan pilihan-pilihan atas kandidat yang maju dalam kompetisi.

Sejarah panjang pengalaman pemilu yang dimiliki oleh rakyat Indonesia, seharusnya mampu membawa tingkat

demokrasi menuju level yang lebih tinggi, melalui konsolidasi yang semakin baik. Konsolidasi demokrasi adalah proses demokrasi dikelola secara baik sehingga menghasilkan tiga elemen penting (Huntington 2005).

Pertama, demokrasi yang terkonsolidasi menghasilkan politik yang stabil. Hal ini karena momentum pemilihan umum langsung merupakan prasyarat penting untuk menjamin stabilitas politik. Pemilu merupakan alat untuk merelegitimasi dukungan masyarakat sehingga menghasilkan pemerintahan yang stabil.

Kedua, demokrasi yang terkonsolidasi akan menghasilkan sistem ekonomi

yang kuat. Pemilihan umum langsung akan memperkuat ekonomi negara dan daerah.

Pemilu berkualitas dan program pembangunan yang jelas dalam debat-debat politik menjelang pemilihan, merupakan salah satu jawaban sementara atas program-program pembangunan ekonomi yang akan diberlakukan. Pemilu yang baik dan berkualitas menghasilkan pembangunan-pembangunan ekonomi yang baik. Ketiga, demokrasi yang terkonsolidasi menjamin tidak adanya konflik atau perang di antara warga atau rakyat (*not fight wars with each other*).

(Bersambung hlm 7 kol 1)

### Demokrasi...

(Sambungan Hal 1)

Hal ini karena prinsip demokrasi yang terkonsolidasi adalah siap menang, siap kalah. Konflik sosial politik diselesaikan secara hukum, bukan dengan kekerasan massa. Pemilu dalam sistem demokrasi yang terkonsolidasi menghasilkan tatanan perilaku dan budaya politik yang demokratis, santun dan taat hukum. Pemilu bukan ajang untuk berseteru, tetapi ajang untuk berkompetisi secara sehat dan adil.

Pilkada serentak 2017 merupakan proses normal dan reguler yang biasa terjadi dalam sebuah negara demokrasi. Proses politik reguler ini harus ditegaskan kepada para pemilih sehingga mereka merespons kompetisi politik ini secara wajar, normal, dan terbiasa berpartisipasi secara reguler dan berkelanjutan.

Pilkada sebagai bagian dari kompetisi politik adalah bagian pendewasaan yang berhubungan dengan tiga masalah utama. Tiga masalah utama yang dihadapi itu berhubungan dengan *non participation behavior* (golongan putih), *black money* (money politik) dan

*black campaign* (kampanye hitam).

Meski golput tidak bisa dijadikan ukuran kualitas demokrasi, jumlah golput yang semakin tinggi dari satu pemilu ke pemilu lain merupakan persoalan politik yang tidak bisa diabaikan. Partisipasi politik merupakan salah satu unsur penting agar proses politik dan pemerintahan bisa berjalan dengan baik.

Politik uang juga merupakan faktor yang masih mewarnai praktik politik di Indonesia sehingga menjadi persoalan penting untuk diselesaikan, baik untuk agenda politik nasional maupun lokal. Pada pilkada serentak 2017 ini, masih ditemui praktik-praktik politik itu. Potensi-potensi kecurangan harus diantisipasi.

Kampanye hitam berbasis SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) merupakan bentuk proses kompetisi yang tidak sehat. Demokrasi yang terkonsolidasi seharusnya mampu mengelola perbedaan-perbedaan politik sebagai sebuah pluralisme.

Tensi tinggi persaingan politik seharusnya mampu dikelola dalam atmosfer politik yang santun, elegan, dan memperkuat persatuan. Pertarungan politik tidak

bisa dibiarkan liar dan tak terkendali, apalagi sampai mengancam persatuan. Demokrasi terkonsolidasi memperkuat kehidupan harmoni.

#### Konfigurasi Politik

Hasil hitung cepat menunjukkan, Pilkada DKI Jakarta belum menghasilkan pasangan calon terpilih karena tidak ada satu pun yang memperoleh dukungan suara minimal 50% plus 1. Pilkada harus memasuki putaran kedua. Ini artinya, tensi politik masih akan menghangat seiring dengan tahapan Pilkada DKI Jakarta yang belum selesai. Dengan demikian, masih dibutuhkan kesabaran dan kedewasaan berpolitik.

Sementara itu, kemenangan calon di tujuh daerah di Jawa Tengah menunjukkan kekuatan partai politik dan kandidat yang beragam. Misalnya petahana yang menang lagi di Salatiga, Cilacap, Pati, dan Brebes, sesungguhnya bukan merupakan sesuatu yang mengagetkan karena mereka memang lebih memiliki akses daripada calon-calon lain.

Kemenangan kandidat baru di Banjarnegara, Jepara, dan Batang merupakan contoh efektifnya mesin partai, figur kandidat, dan

kerja tim sukses. Namun kandidat yang menang di Banjarnegara, Jepara, dan Batang sesungguhnya bukan orang baru sama sekali dalam pentas politik lokal.

Konfigurasi kekuatan partai politik juga mengalami pergeseran. Partai-partai non-PDIP, khususnya Partai Golkar, Partai Demokrat, PPP, dan Partai Gerindra, mulai menunjukkan efektifitas. Kandidat yang diusung PDIP jawara di Brebes dan Pati. Walaupun konfigurasi ini belum bisa dijadikan acuan untuk pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019, konfigurasi politik ini cukup mencengangkan karena umumnya PDIP kuat di sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Lantas, apa sebenarnya agenda usai pilkada serentak 2017 ini? Makmurkan rakyat!

Pengalaman politik rakyat melalui berbagai pemilu dan termasuk pilkada serentak 2017, semestinya memberi kemampuan ke level demokrasi terkonsolidasi. Artinya, pilkada serentak 2017 seharusnya mampu menghasilkan dan menjamin politik dan pemerintahan yang stabil, ekonomi kuat; serta stabilitas sosial berkualitas.

2017, termasuk di tujuh daerah di Jawa Tengah, seharusnya mampu membawa tiga elemen yang ingin diperoleh melalui pemilu langsung, yakni politik pemerintahan yang stabil, ekonomi stabil, dan konflik sosial politik yang terkendali.

Hal ini karena pilkada serentak merupakan alat (bukan tujuan), untuk memakmurkan rakyat. Pilkada yang dilakukan secara regular setiap lima tahun merupakan *tool mechanism* untuk mencari pemimpin pemerintahan yang mampu menjamin kesejahteraan rakyat lahir dan batin.

Dinamika konflik dan kompetisi harus selesai begitu calon terpilih ditentukan. Agenda politik selanjutnya adalah mengelola pemerintahan sehingga mampu mewujudkan keadilan dan kemakmuran rakyat.

Jadi berakhirnya pilkada serentak adalah awal mengelola politik dan pemerintahan lokal lima tahun ke depan yang lebih baik. (39)

— **Dr Teguh Yuwono MPol Admin**, dosen dan analis senior politik dan pemerintahan, ketua Program S-2 Magister Ilmu Politik FISIP Undip